



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIDAYAT SUBROTO HARDI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **226019**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.461.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/200 m² di NEGARA [unknown], HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/64 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/55 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/40 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 187 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 1419 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 161.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 613.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000



4. MOTOR, KAWASAKI KLX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000

5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.802.677

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.160.802.677

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.160.802.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.